

**SISTEM PEMERINTAHAN *GOOD GOVERNANCE* UMAR BIN ABDUL
AZIZ**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**NANA AUDINA
NIM. 140403002**

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDAACEH**

1439 H/2018 M

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu
Dakwah Jurusan Manajemen Dakwah**

Oleh

NANA AUDINA

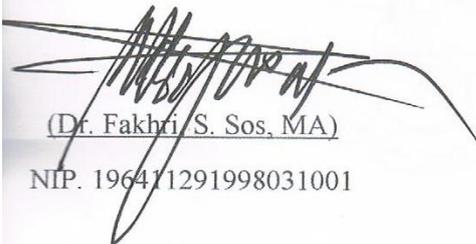
Mahasiswa Fakultas Dakwah

Jurusan Manajemen Dakwah

NIM : 140403002

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Dr. Fakhri S. Sos, MA)
NIP. 196411291998031001

Pembimbing Kedua



(Raihan, S. Sos. I, MA)
NIP. 198111072006042003

Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana S-1
dalam Ilmu Dakwah

Diajukan Oleh :

NANA AUDINA
NIM. 140403002

Pada Hari/Tanggal:

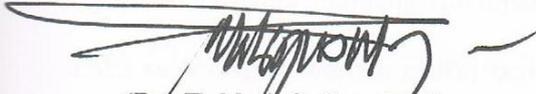
Senin, 30 juli 2018
17 Dzulqaidah 1439 H

di

Darussalam – Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua :


(Dr. Fakhri, S. Sos, MA)
NIP. 196411291998031001

Sekretaris :


(Raihan, S. Sos. I, MA)
NIP. 198111072006042003

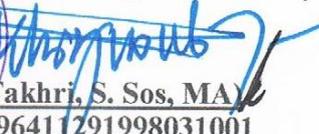
Penguji Pertama :


(Drs. H. Maimun Ibrahim, M.A)
NIP. 19530906 19889031001

Penguji Kedua:


(Sakdiah, S. Ag, M. Ag)
NIP. 197307132008012007

Mengetahui,


Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

(Dr. Fakhri, S. Sos, MA)
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nana Audina

NIM : 140403002

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Peguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, Juli 2018

Yang Menyatakan.



Nana Audina
Nana Audina

NIM: 140403002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Sistem Pemerintahan *Good Governance* Umar bin Abdul Aziz**”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, serta para sahabat beliau sekalian.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Terima Kasih kepada Allah SWT, berkat rahmad dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima Kasih kepada Kedua Orang tua dan Adik yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Terima Kasih kepada Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Terima Kasih kepada Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, M.A. selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I.
5. Terima kasih kepada Ibu Raihan, S.Sos, M.A. selaku Pembimbing II.

6. Terima kasih kepada Seluruh Dosen serta staf pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terima Kasih kepada Sahabat, Rahmad Iqbal bin Abdullah dan Iqlima binti Amiruddin yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada Seluruh Keluarga Besar Unit 12 Manajemen Dakwah angkatan 2014 yang merupakan sahabat seperjuangan.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bila terdapat kekurangan dan kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 20 juli 2018

Penulis,

Nana Audina
NIM: 140403002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
ABSTRAK	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Sistematika pembahasan	8

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem	9
B. Sistem Pemerintah.....	10
1. Pengertian Sistem pemerintahan	10
2. Sistem-sistem Pemerintahan	14
3. Bentuk Pemerintahan	15
C. Konsep <i>Good Governance</i>	18
D. Konsep <i>Good Governance</i> dalam perspektif Islam.....	23

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Sumber Data Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Umar Bin Abdul Aziz	33
1. Riwayat Hidup Umar bin Abdul Aziz.....	33
2. Sifat-sifat Utama Umar bin Abdul Aziz	35
3. Proses Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah.....	44
4. Usaha dan Jasa-jasa Umar bin Abdul Aziz.....	46
B. Sistem Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz	49
1. Gubernur pada masa Umar bin Abdul Aziz.....	50
2. Perencanaan dalam Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.....	53
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.....	55
4. Pengawasan dalam Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz	57
5. Pencegahan Kekacauan Administrasi	58
6. Prinsip Pembagian Tugas	62

C. Konsep <i>Good Governance</i> Umar bin Abdul Aziz	64
1. Musyawarah dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.....	64
2. Keadilan dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.....	6
3. Persamaan dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz	69
4. Kebebasan dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.....	70
5. Tanggung Jawab dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz	74
D. Peluang dan Tantangan Umar bin Abdul Aziz	75
1. Peluang pada Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.....	75
2. Tantangan pada Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.....	78
3. Akhir Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.....	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembaran Pengesahan Pembimbing
- Lampiran 2 : Lembaran pengesahan Tim Penguji
- Lampiran 3 : SK Skripsi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 5 : Dokumentasi pada saat sidang Munaqasyah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sistem Pemerintahan *Good Governance* Umar bin Abdul Aziz”. Sistem Pemerintahan Pada masa Umar bin Abdul Aziz sangat menarik untuk dideskripsikan, hal ini dikarenakan banyaknya dilakukan pembaharuan pada pemerintahan saat itu. Latar Belakang Masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana sesungguhnya Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada masa kekhalifahannya sehingga dikenal sebagai pembaharu pada Bani Umayyah dan juga dapat memimpin secara adil dengan berlandaskan Alquran dan Hadist. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz serta kegiatan pemerintahan apa-apa saja yang dilakukan oleh Umar Pada Kekhalifahannya. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan penerapan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dilakukannya Reformasi besar-besaran dalam sistem pemerintahan yang berhasil membawa kesejahteraan menyeluruh bagi umat dan telah membawa berbagai bentuk keadilan, kebebasan dan kebersamaan pada kaum muslimin sehingga terhapuskan segala kezaliman yang pernah terjadi pada masa sebelum pemerintahannya.

Kata kunci: *Sistem Pemerintahan, Good Governance dan Umar bin*

Abdul Aziz

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara), pemerintah juga diartikan sebagai perbuatan (cara, hal, urusan dsb) memerintah.¹ Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila pengelolaannya itu baik, tata kelola pemerintahan yang baik dikenal dengan sebutan *Good Governance*. *Good* yang berarti baik.² Dan *governance* yang artinya pemerintahan.³ *United Nation Development Program (UNDP)* mendefinisikan *governance* adalah pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif atau efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.⁴

Pemerintah juga dikatakan sebagai pemimpin, Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia menempatkan pemimpin sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, Allah SWT memberi tahu kepada manusia tentang pentingnya kepemimpinan di dalam islam, sebagaimana dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu:

¹W.J.S.poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Tiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka,2007), hlm. 876.

²Desi Anwar, *kamus lengkap 1 Milliard Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm 161.

³Desi Anwar, *Kamus Lengkap 1 Milliard Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*,...hlm.161.

⁴Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, (Jakarta: Setara Press, 2012), hlm. 39.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁵

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan terdiri atas empat unsur, yaitu: Pemimpin, yang disebut dengan khalifah, Wilayah kepemimpinan, yang disebut dalam ayat dengan *Al-Ardh*, Hubungan antara pemimpin, yang tersirat dari kalimat *Ataj'alu fiha manyufsidu fiha* dan yang mengangkat pemimpin, tersirat dari kalimat *Inni ja'il*.⁶ Begitu pula dengan Dinasti Umayyah yang termasuk kedalam salah satu unsur kepemimpinan tersebut yaitu pemimpin, yang di dalam Dinasti Umayyah tersebut dipimpin oleh beberapa khalifah.

Dinasti Bani Umayyah merupakan sebuah pemerintahan Islam yang berdiri setelah pemerintahan Khulafa`ur Rasyidin. Dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun (661-750). Ketika pemerintahan Islam memasuki masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sofyan yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan Islam yang sebelumnya bersifat Demokratis berubah

⁵*Al-Quran dan terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm.13.

⁶Yunasril Ali, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*. (Bandung: Angkasa, 2008), hlm.

menjadi Monarki, disinilah awal mula adanya kepemimpinan monarki didalam Islam.⁷

Muawiyah bin Abi Sofyan juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam, karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-temurun (*monarchy heridity*).⁸ Namun pada pemerintahan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ia menunjukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya.⁹ Umar bukanlah keturunan dari Bani Umayyah.

Selama pemerintahannya yang hampir 1 abad, tepatnya selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Khalifah pertama yaitu Muawwiyah bin Abu Sufyan dan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Adapun urutan khalifah-khalifah Dinasti Umayyah adalah sebagai berikut.

1. Muawwiyah I bin Abi Sufyan (41-60H/661-679M)
2. Yazid I bin Muawwiyah (60-64H/679-683M)
3. Muawwiyah II bin Yazid (64H/683M)
4. Marwan I bin Hakam (64-65H/683-684M)
5. Abdul malik bin Marwan (65-86H/684-705M)
6. Al-Walid I bin Abdul malik (86-96H/705-714M)
7. Sulaiman bin Abdul Malik (69-99H/714-717M)
8. Umar bin abdul Aziz (99-101H/717-719M)

⁷M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Book Publisher, 2009), hlm. 77.

⁸Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 118

⁹Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*,...hlm. 126.

9. Yazid II bin Abdul Malik (101-105H/719-723M)
10. Hisyam bin Abdul Malik (105-125H/723-742M)
11. Al-Walid II bin Yazid II (125-126H/742-743M)
12. Yazid bin Walid bin Malik (126H/743M)
13. Ibrahim bin Al-Walid II (126-127H/743-744M)
14. Marwan II bin Muhammad (127-132H/744-750M)

Salah satu Khalifah terbesar dari Bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz.¹⁰ Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun (99-101H/717-719M) atau lebih tepatnya dua tahun lima bulan, Akan tetapi dalam kepemimpinan yang sangat singkat ini perubahan yang ia lakukan sangat signifikan dampaknya. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Umayyah sebelumnya.

Khalifah yang adil itu berusaha memperbaiki segala tatanan yang ada di masa kekhalifahannya seperti menaikkan gaji para gubernurnya, pemeratakan kemakmuran dengan memberi santunan kepada fakir miskin, dan memperbarui dinas pos. Bahkan ia juga menyamakan kedudukan orang-orang Non-Arab sebagai warga negara kelas dua dengan orang-orang Arab dan mengurangi beban pajak dan menghentikan pembayaran jizyah bagi orang Islam baru.¹¹ Sifat Umar bin Abdul Aziz yang Adil dan menyamakan kedudukan warga negaranya merupakan prinsip dari kepemimpinan yang baik (*good governance*).

¹⁰Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*....hlm. 121-122.

¹¹Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*....hlm. 128.

Umar bin Abdul Aziz selama masa pemerintahannya, memperlihatkan kemajuan diberbagai aspek, Umar memberikan hak untuk ikut berperan aktif di dalam diwan-diwan kepada seluruh pasukan Muslim yang aktif, baik Arab maupun Non-Arab. Umar juga memberlakukan prinsip baru dalam sistem perpajakan yang didasarkan atas asas persamaan antara Muslim Arab dan Muslim Non-Arab, baik berupa pajak jiwa maupun pajak tanah. Khalifah Umar menetapkan bahwa pajak bukan sebuah fungsi dari status individual. Muslim Non-Arab diharapkan membayar pajak tanah, dan demikian pula Muslim Arab harus membayar pajak tanah-tanah mereka secara penuh. Dan menghapuskan antagonisme antara Arab dan non-Arab.¹² Dari banyak kemajuan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul aziz dapat dikatakan bahwa pemerintahannya merupakan Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Oleh karena itu, Keberhasilan suatu pemerintahan ditentukan oleh tatakelola yang baik dan mampu memberikan kesejahteraan, maupun ketentraman kepada rakyatnya, Penegakan hukum, keadilan dan tidak pandang bulu merupakan keharusan seorang pemimpin. Membangun perekonomian yang merata, mengelola sistem perdagangan, termasuk pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat merasakan dampak positifnya.

Namun, bagaimanapun sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz jika dipelajari dalam kerangka konsep modern atau apa yang dinamakan dengan *good governance* sangat berbeda dengan praktik *good governance* sekarang, dimana pada kenyataan praktik pemerintahan saat ini tidak sesuai dengan konsep *good*

¹²Fahsin M. Fa'al, *Sejarah Kekuasaan Islam*, (Jakarta Barat: CV. Artha Rivera, 2008), hlm.21.

governance yang sesungguhnya, disamping itu juga praktik-praktik pemerintahan pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi fenomena menarik apakah masih *up to date* dilakukan dalam kerangka konsep *good governance* saat ini, Oleh karena demikian menjadi menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan suatu penelitian dengan judul “**Sistem Pemerintahan *Good Governance* Umar Bin Abdul Aziz**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz?
2. Bagaimana upaya Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan konsep *Good Governance*?
3. Bagaimana peluang dan tantangan Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan *Good Governance* dalam pemerintahannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem pemerintahan Umar bin Abdul aziz dalam menjalankan kekuasaannya.
2. Untuk mengetahui konsep *Good Governance* pada masa Umar bin Abdul Aziz.
3. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis/Akademis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang studi ilmu *leadership islam* dan sebagai bahan pertimbangan bagi prodi Manajemen Dakwah untuk bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua tentang kepemimpinan yang baik.

E. Sistematika pembahasan

Dalam memenuhi kelengkapan sebuah hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan. Dimana terdapat penjelasan mengenai apa saja yang akan dibahas pada setiap bab.

Bab satu merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab dua membahas tinjauan pustaka tentang sistem pemerintahan, *good governance* dan Umar bin Abdul Aziz.

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian dan teknik analisis data.

Bab empat membahas tentang hasil penelitian yang telah dianalisis.

Bab lima yaitu bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta saran-saran yang membangun.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem

Sistem adalah jaringan dari prosedur-prosedur yang disusun dalam rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi pokok dalam suatu badan usaha.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²

Dengan kata lain, istilah sistem dapat menunjukkan beberapa pengertian, misalnya:

- a. Dipakai untuk menunjuk adanya suatu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan secara alamiah maupun oleh budidaya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu. Misalnya sistem tata surya.
- b. Sistem dapat merujuk adanya alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit namun amat vital. Misalnya sistem saraf.

¹Chairul Marom, *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.1.

²Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1320.

- c. Sistem dapat dipakai untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis. Misalnya sistem pemerintahan demokrasi.
- d. Sistem dapat digunakan untuk menunjuk pada suatu cara atau metode. Misalnya sistem mengetik sepuluh jari, sistem belajar jarak jauh, sistem modul dalam pengajaran.³

B. Sistem pemerintahan

1. Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.⁴

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan serta

³Fuad Ihsan, *Dasar-dasar kependidikan*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001), hlm. 107.

⁴Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:1983), hlm. 17.

hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.⁵

Berikut ini merupakan definisi sistem pemerintahan menurut para pakar, yaitu:

a. Menurut Pamudji (1982)

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau yang utuh.

b. Menurut Prajudi (1982)

Sistem adalah suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

c. Menurut Poerwadarminta (1989)

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat atau sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

d. Menurut Sumantri (1987)

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

⁵Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*,...hlm. 171.

e. Menurut Musanef (1985)

Sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur.

f. Menurut Henry Pratt Fairchild

System is aggregate of related interest pr activities, there is the assumption of an organization of parts or phases in orderly arrangement.

g. Menurut Eric kohler (1979)

*System is a collection of objects pr events conforming to a plan, the plan it self.*⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu rangkaian yang terkait satu sama lain, antara suatu rangkaian dengan rangkaian lain bekerja sama yang bertujuan untuk menjalankan fungsinya. Begitu pula dengan sistem pemerintahan, antara satu sistem dengan sistem yang lain saling bekerja sama untuk menjalankan pekerjaannya demi mencapai tujuan pemerintahan.

Sistem pemerintahan di suatu negara berpengaruh pada subsistem pemerintahan di daerah-daerah. Sebaliknya, sistem pemerintahan di suatu daerah akan berpengaruh pada subsistem pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun desa.⁷

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisirkan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan

⁶Inu Kencana syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Cet.1 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm.7-8.

⁷Inu Kencana syafiie. *Ilmu pemerintahan*,...hlm. 8.

pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Lalu ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Menurut ketiga batasan di atas dapat disimpulkan pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara).⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sistem Pemerintahan adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan negara.

Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Mahfud MD menambahkan bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.⁹

⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 214.

⁹Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.

2. Sistem-sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan dapat dibagi kedalam beberapa sistem, diuraikan sebagai berikut:

a. Sistem pemerintahan presidensial

Sistem pemerintahan dengan bentuk kabinet presidensial, yaitu kabinet yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden, agar para menteri tidak berlindung di bawah kekuasaan presiden apabila melakukan kesalahan. Badan legislatif (parlemen) dengan badan eksekutif (presiden dan mentrinya) harus saling mengawasi secara ketat (*cheking power with power*)

b. Sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan dengan bentuk kabinet presidensial, yaitu kabinet yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini karena parlemen yang memilih menteri-menteri yang tepat begitu juga perdana menteri sendiri. Anggota parlemen dapat menjatuhkan kesalahan masing-masing menteri.

c. Sistem pemerintahan campuran

Sistem pemerintahan dengan bentuk kabinet campuran, yaitu kabinet yang presidennya tidak hendak kehilangan kekuasaan ketika anggota palemen memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Oleh karena itu, yang jatuh hanya perdana menteri dan menteri-menterinya, tetapi presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.

Dari sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer karena sistem ini terbentuk dari pengkajian sejarah perjalanan beberapa negara. Jadi, sistem pemerintahan campuran ini biasanya selain memiliki presiden ataupun raja sebagai kepala negara juga memiliki kepala pemerintahan yaitu perdana menteri.

d. Sistem pemerintahan komunis

Sistem pemerintahan dengan bentuk kabinet komunis yaitu kabinet yang baik kepala pemerintahan maupun kepala pemerintahan dijabat secara *ex officio* oleh pimpinan partai komunis, mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan daerah, karena partai komunis yang ada di daerah sekaligus menjadi kepala daerah dan kepala wilayah.¹⁰

3. Bentuk pemerintahan

Dalam sejarah berdirinya negara-negara di dunia, sejak zaman Yunani kuno hingga modern, telah banyak bentuk pemerintahan dan bentuk negara yang dianut, namun, yang paling terkenal adalah monarki dan republik.

a. Monarki

Monarki adalah salah satu cabang dari salah satu bentuk pemerintahan otokrasi (satu tangan). Kata otokrasi berasal dari kata “oto” yang berarti “sendiri”

¹⁰Inu kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 73-75.

dan “krotos” yang berarti “pemerintahan”. Jadi, otokrasi adalah pemerintahan sendiri. Maksudnya, pemerintahan yang hanya dipegang oleh satu orang.¹¹

Monarki adalah kata lain dari kerajaan, di dalam kerajaan hanya ada satu penguasa atau penguasa tunggal yang bernama raja. Secara bahas, monarki berasal dari bahasa Yunani *monarchia*. Ada dua kata dasar yang membentuk yakni kata *monos* yang artinya “tunggal” dan *archein* yang artinya “memerintah”. Maka, monarki adalah bentuk negara yang diperintah oleh satu orang, menurut garis keturunan.

Dilihat dari sejarahnya monarki merupakan bentuk pemerintahan tertua dalam tatanan kenegaraan di dunia. Bahkan, sistem ini telah digunakan jauh sebelum masyarakat bisa membaca.¹²

Jelinec dan Leon Duguit mengatakan bahwa ada tiga bentuk pemerintahan monarki, yaitu:

- a. Monarki absolut, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah atau kaisar (sebutan untuk jabatan ini antara satu wilayah dengan wilayah lain). Dalam pemerintahan monarki absolut seluruh wewenang dan kekuasaan raja tidak terbatas. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Bentuk pemerintahan ini diterapkan pada masa revolusi Prancis dan juga kerajaan Nusantara pada masa lalu.
- b. Monarki konstitusional, pemerintahan dikepalai oleh kekuasaan raja, namun dibatasi oleh konstitusi (undang-undang). Raja harus bertindak sesuai dengan konstitusi (undang-undang). Contoh pemerintahan yang

¹¹Radis Basdian, *Sistem-sistem Pemerintahan sedunia: Ragam bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara-negara di dunia*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hlm. 27.

¹²Radis Bastian, *Sistem-sistem Pemerintahan sedunia*,...hlm. 28.

berbentuk monarki konstitusional adalah negara Saudi Arabia dan Denmark.

- c. Monarki parlementer, pemerintah yang dikepalai oleh raja dan disamping raja ada parlemen (badan yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan). Kekuasaan raja sangat terbatas karena dibatasi oleh undang-undang. Parlemen ini juga sebagai tempat para menteri, baik sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab. Raja hanya sebagai lambang kesatuan negara. Contoh bentuk pemerintahan monarki parlementer adalah negara Inggris, Belanda, Jepang, dan Thailand.¹³

b. Republik

Bentuk pemerintahan republik jelas berbeda dengan monarki. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah sistem pergantian penguasa. Dalam bentuk monarki, penguasa (raja/ratu), digantikan secara turun temurun, sedangkan bentuk republik dipilih langsung oleh rakyat.¹⁴

Kata republik berasal dari bahasa latin, *rechs* yang artinya “hukum” atau “kekuasaan” dan *publica* yang berarti “rakyat”. Bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh presiden. Inilah kemudian yang membedakannya dengan bentuk pemerintahan monarki yang dipimpin oleh raja/ratu sebagai penguasa tunggal. Dalam republik, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih oleh parlemen secara berkala. Sementara kekuasaan

¹³T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm 17-18.

¹⁴Radis Bastian, *Sistem-sistem Pemerintahan sedunia,...*hlm. 41.

legislatif dipegang oleh parlemen, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh lembaga peradilan (Mahkamah Agung).

Konsep republik telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu. Konsep ini menjadi solusi atas kemandekan konsep monarki yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Oleh karena itu, negara republik mendasarkan tompuk pemerintahannya pada rakyat, bukan kepada keturunan bangsawan seperti konsep monarki.¹⁵

Sama seperti bentuk pemerintahan monarki yang terbagi kepada tiga model, bentuk pemerintahan republik pun memiliki tiga model, yaitu republik absolut, republik konstitusi dan republik parlementer.¹⁶

C. Konsep Good Governance

Secara bahasa, kata *good* yang berarti baik, dalam istilah pemerintahan mengandung 2 (dua) pemahaman. Pemahaman pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁷

Sedangkan *Governance* secara istilah adalah proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana sebuah keputusan diimplementasikan. *Good*

¹⁵*Ibid*,...hlm. 42.

¹⁶*Ibid*,...hlm. 44.

¹⁷Sunaryo, *Implementasi Good Governance dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. (Jakarta: IRJEN DEPAG RI, 2007), hlm. 72.

governance diartikan sebagai *governance* yang baik. *Governance* dapat digunakan dalam berbagai konteks diantaranya *Coorporate governance*, *government governance*, *international governance*, *nasional governance* dan *local governance*.¹⁸

Secara umum istilah *good governance* memiliki pengertian segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat).¹⁹

Untuk mewujudkan praktik *good governance* ada tiga pilar yang saling berkaitan. Masing-masing pilar tidak bisa berjalan sendirian, ketiganya bahkan saling mendukung. Tegaknya satu pilar tanpa diikuti pilar yang lain membuat pilar tersebut tidak dapat tegak. Untuk pilar kedua ada yang menyebutnya sebagai mekanisme pasar bukan usaha atau sektor swasta. Walaupun berbeda namun maknanya sama, pengertian mekanisme pasar mengisaratkan adanya sektor swasta yang menjalankan usahanya sesuai mekanisme pasar.²⁰ Tiga pilar tersebut yaitu:

¹⁸Dwi martini, *Konsep, Strategi dan Implementasi Good governance dalam Pemerintahan*, (Jakarta: IRJEN DEPAG RI, 2007), hlm. 4-5.

¹⁹Komaruddin Hidayat, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet III. (Jakarta: ICCE, 2007), hlm. 216.

²⁰Iskandar Hasan, *Peran dan Fungsi Pengawasan dalam Perwujudan Good Governance*, (Jakarta: IRJEN DEPAG RI, 2007), hlm.236.

1. Negara

- a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil.
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.
- c. Menyediakan publik service yang efektif dan accountable
- d. Menegakkan HAM.
- e. Melindungi lingkungan hidup.
- f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

2. Sektor swasta atau Dunia usaha

- a. Menjalankan industri.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan.
- d. Meningkatkan standar hidup masyarakat.
- e. Memelihara lingkungan hidup.
- f. Menaati peraturan.
- g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.
- h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat madani

- a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- b. Memengaruhi kebijakan publik
- c. Sebagai sarana checks and balances pemerintah
- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan social pemerintah
- e. Mengembangkan SDM

- f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.²¹

Santosa menjelaskan bahwa *Governance* sebagaimana yang didefinisikan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* adalah pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut dikatakan baik jika dilakukan dengan efektif atau efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.²²

United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa ada Sembilan Prinsip Good Governance, yaitu:

1. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan Hukum. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi
4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.

²¹Iskandar Hasan, *Peran dan Fungsi Pengawasan*,...hlm. 237.

²²Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, (Jakarta: Setara Press, 2012), hlm. 39.

6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.²³

Sedarmayanti menjelaskan bahwa ada empat unsur yang sangat mempengaruhi ciri dari pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Akuntabilitas

Adanya kewajiban dari aparat pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

²³Sirajuddin, Sukriono Didik, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*,..hlm. 39-40.

2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

3. Keterbukaan

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

4. Aturan Hukum

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.²⁴

a. Konsep Good Governance dalam perspektif Islam

Sedangkan dalam perspektif Islam, elemen-elemen pemerintahan yang *baik (good governance)* secara normatif haruslah berangkat dari beberapa landasan antara lain:²⁵

Pertama, Syura atau musyawarah merupakan suatu prinsip yang menjadi wahana di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui partisipasi terbuka.

Secara eksplisit ditegaskan dalam Alquran. Dalam Alquran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah.²⁶

²⁴Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian kedua*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004), hlm. 7.

²⁵Ali Nurdin. *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm .225.

Misalnya disebutkan dalam Surah As-Syura ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.²⁷

Prinsip musyawarah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana digariskan dalam Alquran Surah Ali-Imran ayat 159:²⁸

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.²⁹

Kedua, al-‘Adlah atau keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang baik. Baik itu dalam konteks hukum atau dalam kerangka membangun pemerataan sumber-sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, diantaranya dalam Surah An-Nahl ayat 90:

²⁶Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa kini)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 111.

²⁷*Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Alwaah, 1989), hlm. 789.

²⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*,...hlm. 111.

²⁹*Al-Quran dan Terjemahnya*,...hlm. 103.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.³⁰

Dalam Surah An-Nisa ayat 135 perkataan *Al-Qist* merupakan sinonim perkataan keadilan.³¹ Yaitu:

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٦﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.³²

Dalam ayat di atas sekurang-kurangnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman
2. Setiap mukmin jika menjadi saksi ia wajib menjadi saksi karena Allah dan menjadi saksi sejujur-jujurnya.
3. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan dilarang menyelewengkan kebenaran.³³

³⁰ *Al-Quran dan Terjemahnya*,...hlm. 415.

³¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*,...hlm. 117.

³² *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 144.

³³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*,...hlm. 118.

Ketiga, al-Musawah atau egaliterianisme (persamaan) yakni semua elemen dalam masyarakat sama haknya sebagai warga negara dan diperlakukan yang sama pula dalam hak-haknya untuk hidup. Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Sebagaimana dalam Alquran Surah Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.³⁴

Elemen pemerintahan yang baik dalam Islam yang *keempat* adalah Al-Masuliyah atau tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan adalah suatu karunia dan nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipertanggung jawabkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya, perkataan amanah tercantum di dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 58 :³⁵

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمًا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

³⁴Al-Quran dan Terjemahnya,...hlm. 847.

³⁵Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*,...hlm. 105.

*memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*³⁶

Elemen *good governance* dalam pandangan Islam yang kelima adalah Al-Hurriyyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya, asalkan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana dalam Alquran Surah Ali-Imran ayat 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya:

*“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bergegas kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh”.*³⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) terdiri dari beberapa elemen, yaitu musyawarah, dimana setiap keputusan harus dilakukan bersama. keadilan, merupakan prinsip yang paling utama dalam sebuah pemerintahan yang baik. kesamaan hak, bahwa setiap elemen dalam pemerintahan mempunyai hak yang sama. bertanggung jawab, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang diberikan kepadanya. dan kebebasan, setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya untuk Amar makruf nahi mungkar.

³⁶ Al-Quran dan Terjemahnya,...hlm. 128.

³⁷ Al-Quran dan Terjemahnya,... hlm. 94.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat peneliti menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menggunakan beberapa literatur atau bahan perpustakaan. Penelitian perpustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang ada kaitannya dengan skripsi ini.²

¹Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hlm. 9.

²Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), hlm.31.

Untuk membahas suatu persoalan dalam penelitian diperlukan suatu metode agar tercapai tujuan penelitian. Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan metode historis. Metode ini merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah pada masa lampau yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.³

C. Sumber data penelitian

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴

- a. Data primer adalah buku dan tulisan-tulisan tentang Umar bin Abdul Aziz.

Diantaranya buku :

Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shoufau Qolbi Jakarta:Pustaka Al-kausar, 2010.

Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR, Jakarta: Beirut, 2014.

- b. Sedangkan yang menjadi data sekunder diperoleh dari bahan bacaan, menganalisis buku-buku dan referensi-referensi lain yang ada di situs internet yang relevansi dengan pemikiran yang dikaji dalam penelitian ini.

³Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1999), hlm.53.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengumpulan data, menilai keabsahan data, analisis data dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁵ Serta melacak referensi-referensi dengan cara membaca, menelaah dan mencatat semua data yang relevan dengan masalah yang diteliti guna untuk menemukan makna yang dimaksud.

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, Metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶ Hal ini dilakukan dengan analisis wacana (discourse analysis) supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisis.

⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.222.

⁶Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 8.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁸

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum,

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.IV (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 244.

⁸Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi, (Mixed methods)*, Cet.V (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.331.

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Verifikasi atau penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,...hlm. 246-252.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Umar bin Abdul Aziz

1. Riwayat Hidup Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdisyams bin Abdil Manaf. Gelarnya adalah Al-Imam Al-Hafizh Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-‘Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqan, Abu Hafsh Al-Qurasyi Al-Umawi Al-Madani Kemudian Al-Mishri, Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid Asyaji Bani Umayyah.¹

Umar lahir di Madinah pada tahun 61 H.² Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun kelahiran Umar bin Abdul Aziz, namun pendapat yang kuat mengatakan bahwa dia dilahirkan pada tahun 61 H. Inilah pendapat yang dipegang oleh sebagian besar ahli sejarah, sebab pendapat ini menguatkan pendapat yang lain yang mengatakan bahwa dia meninggal dunia pada usia empat puluh tahun, dimana dia meninggal dunia pada tahun 101 H. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dia lahir di Mesir, tetapi pendapat ini lemah sebab ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam baru memerintah wilayah mesir pada Tahun 65 H.

¹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 1.

²Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shoufau Qolbi (Jakarta:Pustaka Al-kausar, 2010), hlm.11.

Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa dia dilahirkan di madinah pada masa kepemimpinan Yazid.³

Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Dia termasuk salah satu gubernur terbaik Bani Umayyah yang pemberani dan dermawan, Dia menjabat sebagai gubernur mesir lebih dari dua puluh tahun. Di masa muda, Abdul Aziz bin Marwan dikenal berperilaku baik, disamping itu dia pun dikenal karena kesungguhan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu juga karena perhatiannya terhadap hadist Nabi SAW. Ibunya bernama Ummu ashim binti Ashim bin Umar bin Al-Khattab. Ayahnya bernama Ashim bin bin Umar bin Al-Khattab, Al-faqih Asy-Syarif Abu Amr Al-Qursyi Al-Adawi. Lahir pada masa Kenabian dan meriwayatkan hadits dari ayahnya. Ibunya bernama Jamilah Bin Tsabit bin Abi Al-Aqlah Al-Anshariyah.⁴

Umar memiliki akhlak yang baik dan wajah yang tampan, memiliki akal yang sempurna, kepribadian yang baik, pandai berpolitik, selalu berusaha untuk terus bersikap adil, berpengetahuan luas, memahami ilmu psikologi, cerdas, ahli tobat, tunduk kepada Allah, tidak gila jabatan, selalu mengungkapkan kebenaran. Dia dicatat sebagai salah satu Khulafa' Ar-Rasyidin juga salah satu Ulama yang mengamalkan ilmunya, dan dia adalah seorang yang sangat fasih dan lancar dalam berbicara.⁵

Umar bin Abdul Aziz diberi gelar Al-Asyaj. Dia disebut Al-Asyaj Bani Marwan karena ketika masih kecil Umar bin Abdul Aziz pernah

³Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 4.

⁴Ali Muhammad Ash-shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 3.

⁵*Ibid*,...hlm.1-2.

masuk ke kandang kuda ayahnya ketika menjabat sebagai gubernur mesir untuk melihat-lihat kuda, tiba-tiba seekor kuda menendangnya tepat di bagian wajahnya hingga melukainya.⁶ Masa kecilnya dia tumbuh di Madinah di kalangan keluarga pamannya dari pihak ibu yang menjadi gubernur Madinah yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau tumbuh besar dalam lingkungan keluarga terhormat dan mendapatkan pengaruh banyak dalam kehidupan Umar bin Abdul Aziz dari keluarga paman beliau.⁷

Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dengan menyelesaikan pendidikan awalnya dalam bahasa Arab dan juga menghafalkan Alqur'an dan Hadist di bawah pengawasan Shalih bin Kaisar dan beberapa tabi'in seperti Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.⁸

2. Sifat-sifat Utama Umar bin Abdul aziz

Kepribadian Umar bin Abdul Aziz merupakan kepribadian pemimpin yang sangat menarik, dia memiliki sifat-sifat pemimpin rabbani. Diantara sifat-sifat itu adalah keimanannya yang kuat kepada Allah dan keagungan-Nya, keimanannya kepada hari akhir dan tempat kembali, takut kepada Allah, keyakinan kepada Allah, pengetahuannya yang luas, suri teladan, jujur, cakap, berani, berwibawa, zuhud, suka berkorban, rendah

⁶*Ibid*,...hlm. 4.

⁷Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu Bani Umayyah*,...hlm. 18.

⁸Muhammad Mojlum, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, terj. Wiyanto Suud dan Khairul Imam, (Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012), hlm. 176.

hati, suka menerima nasehat, lemah lembut, sabar, bercita-cita luhur, tegas, manajemen yang handal, adil, kemampuan mengatasi berbagai masalah, kemampuan merencanakan, mengarahkan, mengatur, serta mengawasi dan sifat-sifat terpuji lainnya.⁹

Diantara sifat-sifat utama yang telah menyatu dalam kepribadian Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut:

a. Sangat takut kepada Allah

Ini adalah keistimewaan dan ciri khas yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Faktor pendorongnya adalah keimanan yang sangat kuat kepada akhirat, ketakutannya kepada Allah dan kerinduannya kepada surga. Hanya keimanan yang kuat inilah yang dapat menjaga seorang pemuda seperti Umar bin Abdul Aziz yang memiliki kekuatan, kebebasan, dan kekuasaan, dari godaan-godaan materi, bisikan-bisikan setan, juga hawa nafsu yang melenakan, serta mengharuskannya untuk mengintrospeksi diri secara teliti dan konsisten di jalan kebenaran.¹⁰

Umar bin Abdul Aziz sangat merindukan surga, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, dan percaya kepada firman Allah surah Ghafir ayat 39;

⁹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm.69.

¹⁰Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm.70.

يَنْقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿١١﴾

Artinya:

*Hai kaumku, Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan Sesungguhnya akhirat Itulah negeri yang kekal.*¹¹

Dengan jiwa yang bersih dan akidahnya yang benar, Umar menyadari bahwa akhirat bagi seorang muslim lebih penting dari dunia. Karena Rasa takutnya teramat sangat kepada Allah, Umar bin Abdul Aziz cepat menangis dan mengeluarkan Air mata.¹²

Istrinya Fatimah binti Abdul Malik pernah berkata:

“Demi Allah, dia bukan orang yang banyak shalat dan banyak puasa, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang sangat takut kepada Allah melebihi ketakutan Umar kepada Allah. Dia ingat kepada Allah di kasurnya, tiba-tiba tubuhnya gemetar karena takut. Sehingga kami berkata, ‘mungkin saat pagi tiba, rakyat tidak akan memiliki Khalifah lagi, Umar bin Abdul Aziz juga sangat takut kepada hari kiamat’.”¹³

b. Zuhud

Lewat interaksinya dengan Al-Quran, pembelajarannya tentang petunjuk Nabi Muhammad SAW dan tafakkurnya tentang kehidupan ini, Umar bin Abdul Aziz dapat memahami bahwa dunia ini adalah negeri yang penuh cobaan dan ujian serta ladang untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, dia membebaskan dirinya dari pengaruh dunia dengan segala keindahan, perhiasan

¹¹ *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm. 765.

¹² Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm.70.

¹³ Ali Muhammad Ash-shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shofau Qolbi (Jakarta: Al-kausar, 2010), hlm. 104-105.

juga kilauannya. Dia hanya tunduk patuh dan berserah diri kepada tuhannya lahir dan batin.¹⁴

Kezuhudannya berlandaskan kepada Alquran dan Sunnah, dengan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, tidak merasa senang dengan apa yang ada (kekhalifahan), dan tidak bersedih akan sesuatu yang telah hilang dari perkara-perkara duniawi. Dia meninggalkan perkara-perkara duniawi yang sebetulnya biasa didapatkannya, karena disibukkan dengan perkara yang memberikan kebaikan akhiratnya dan menggapai apa yang ada di sisi Allah.¹⁵

Malik bin Dinar menuturkan kehebatan zuhud Umar bin Abdul Aziz, suatu hari Malik duduk bersila diantara orang-orang, lalu ia berkata:

“zahid sejati adalah Umar bin Abdul Aziz yang didatangi dunia namun ia meninggalkannya. Ia menyingkirkan dari pundaknya pakaian kebesaran, selendang kesombongan, lalu pergi menghancurkan rasa tinggi hati di dalam jiwanya”.¹⁶

¹⁴Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm.71.

¹⁵Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...72.

¹⁶Muhammad Siddiq Al-Minsyawi, *100 Tokoh Zuhud*, terj. Abdullah, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007), hlm. 73.

c. Rendah Hati (Tawadhu')

Allah berfirman dalam Surah Al-Furqan Ayat 63, yaitu:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

Artinya:

*“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”.*¹⁷

Ibnu Al-Qayim mengatakan “Maksudnya mereka berjalan dengan tenang, berwibawa dan rendah hati”. Sifat terpuji ini merupakan salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz, zuhud telah membawanya untuk bersikap rendah hati, karena syarat zuhud yang sebenarnya adalah rendah hati terhadap Allah. Contoh dari kerendahan hati Umar tercermin dalam jawabannya ketika seseorang memanggilnya, “Wahai khalifah Allah di bumi!” Umar menjawab “Jangan panggil begitu, Sesungguhnya ketika aku dilahirkan keluargaku telah memilihkan sebuah nama untukku, mereka memberi namaku Umar, jika kamu memanggilku dengan sebutan Umar maka aku akan menjawabmu. Karena khalifah Allah di bumi adalah Nabi Daud dan Nabi

¹⁷Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm. 368.

Muhammad SAW serta yang sederajat dengannya.¹⁸ Sesuai dengan firman Allah surah Shaad ayat 26:

يٰۤاٰوُدُّ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

Artinya

*“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi”.*¹⁹

d. Wara’

Diantara sifat yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz adalah wara’, Wara’ adalah menahan diri dari apa-apa yang membahayakan, termasuk juga segala sesuatu yang haram dan yang syubhat, karena itu semua dapat membahayakan. Wara’ makna asalnya adalah menahan diri dari sesuatu yang haram dan mewaspadainya. Contoh sifat wara’ Umar adalah kehati-hatiannya terhadap syubhat, disebutkan dalam sebuah riwayat Umar sangat suka makan dengan madu, suatu hari dia meminta madu kepada keluarganya namun keluarganya tidak mempunyai madu, beberapa saat kemudian keluarganya membawakan madu untuknya dan dia makan dengan madu itu.

Lalu dia bertanya “Dari mana kalian mendapatkan madu ini?” Istrinya menjawab, “Aku menyuruh pelayanku untuk membeli madu ini seharga dua dinar dengan mengendarai bagal tukang pos,”

¹⁸Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hlm. 75.

¹⁹*Al-Quran dan Terjemahnya*,...hlm. 736.

kemudian Umar menjual madu dengan harga lebih dari dua dinar, dia mengembalikan uang dua dinar kepada istrinya dan memberikan sisanya kepada Baitul Mal kaum Muslimin.

Lalu dia berkata “Engkau telah menggunakan kendaraan kaum muslimin untuk memenuhi keinginanmu”.²⁰

Sedemikian tinggi sifat wara’ yang dimiliki oleh Umar hingga dia tidak menggunakan unta kekhalifahan dan baitul mal untuk melayaninya.²¹

e. Lemah lembut dan Pemaaf

Diantara sifat yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz adalah lemah lembut dan pemaaf. Diriwayatkan bahwa ada laki-laki yang mencela Umar bin Abdul Aziz, namun dia tidak membalasnya.

Lalu seseorang bertanya kepadanya, “Apa yang menghalangimu untuk membalas celaannya?” Umar menjawab, “seorang yang bertaqwa itu dikekang.”²²

Ibrahim bin Abu ‘Ablah meriwayatkan bahwa suatu ketika, saat Umar bin Abdul Aziz sangat marah kepada seorang laki-laki, dan dia memerintahkan untuk membawa laki-laki itu ke hadapannya. Saat laki-laki itu sudah berada di hadapannya dan cambuk telah disiapkan.

²⁰Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm.77

²¹Muhammad Siddiq Al-Minsyawi, *100 Tokoh Zahud*, terj. Abdullah, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007), hlm. 75

²²Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 79

Umar berkata, “Lepaskanlah dia!”, kemudian dia melanjutkan, “Seandainya aku tidak sedang marah pasti aku akan menghukummu”.

Lalu dia membacakan firman Allah Surah Ali-Imran ayat 134, yaitu:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ

Artinya:

*“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang”.*²³

f. Sabar

Kesabaran terbesar yang ditanggung Umar dalam kehidupannya adalah kekhalifahan. Umar pernah berkata. “Demi Allah, tidaklah aku duduk di tempatku ini kecuali karena aku takut tempat ini akan diduduki oleh orang yang bukan ahlinya. Kalaulah aku menuruti keinginanku, tentu aku akan menyerahkan perkara ini kepada orang yang berhak. Tetapi aku tetap bersabar sampai Allah memutuskan perkara ini dari sisi-Nya atau Dia mendatangkan kemenangan”.²⁴

g. Tegas

Diantara bukti ketegasan Umar bin Abdul Aziz dan keseriusannya dalam menangani berbagai perkara serta tidak menganggap sepele perkara yang dianggap penting bagi

²³*Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm. 98.

²⁴Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 81.

kemaslahatan umum dan kemaslahatan kaum muslimin adalah ketegasannya dalam menghadapi pembesar dan tokoh Bani ,Umayyah serta orang-orang yang ingin memecah belah persatuan kaum muslimin, menyebar fitnah, menumpahkan darah dan lain-lain.²⁵

h. Adil

Para ulama sepakat bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan salah seorang pemimpin yang adil, khalifah yang bijaksana dan imam yang lurus. Contoh sikap adilnya sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Hakm bin Umar Ar-Ra'ini.

Dia berkata, “Aku menyaksikan Musallamah bin Abdul Malik berdebat dengan warga Dir Ishaq di hadapan Umar bin Abdul Aziz di Na’urah. Maka Umar berkata kepada Musallamah, “Jangan duduk di atas bantal sementara lawanmu duduk di hadapanku, dan wakilkanlah orang yang kamu pilih dalam perdebatanmu ini. Jika tidak, saat ini utusan mereka ada di hadapanku”.

Maka Musallamah mewakilkan urusannya kepada *maulanya*. Kemudian Umar memutuskan bahwa Musallamah kalah dalam perdebatannya di Na’urah.”²⁶

²⁵*Ibid*,...hlm. 82.

²⁶Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 83.

i. Banyak memohon dan berdoa kepada Allah

Umar bin Abdul Aziz banyak memohon dan berdoa kepada Allah. Diantara doanya:

“Ya Allah, berilah aku kesehatan sehingga kehidupan dapat bermanfaat bagiku, tutuplah usiaku dengan ampunan-Mu sehingga dosa-dosa tidak akan mencelakakanku, cukupkan bagiku kesusahan demi surga sehingga Engkau memasukkanku ke dalam surga dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Penyayang.”

Umar juga berdoa, “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari mengganti nikmat-Mu dengan kekufuran, atau mengingkarinya setelah kehilangannya, atau melupakannya sehingga aku tidak memuji-Mu karenanya.” Umar juga sering mengucapkan doa, “Ya Allah, buatlah aku ridha terhadap keputusan-Mu, berkatilah aku dalam takdir-Mu, sehingga aku tidak suka menyegerakan sesuatu yang Engkau tunda atau menunda sesuatu yang Engkau segerakan.”²⁷

3. Proses Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah

Ketika Al-Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah sepeninggalan ayahnya pada tahun 86 H. Ia senantiasa memperlakukan Umar bin Abdul Aziz saudara sepupunya dengan baik, sebagaimana perlakuan ayahnya kepadanya. Ia pun mengangkat Umar sebagai wali kota madinah pada tahun 87 H. pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai wali kota madinah membuktikan bahwa Khalifah Al-Walid ingin menebarkan

²⁷Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 84.

keadilan diantara warga kota dan memperlakukan mereka sebaik-baiknya.²⁸

Umar memerintah sebagai wali kota Madinah selama enam tahun, pada tahun 93 H, Al-Walid mencopot Umar bin Abdul Aziz dari jabatannya sebagai wali kota Madinah atas permintaan Al-hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi gubernur irak, yang mengadu kepada Al-Walid bahwa para pemberontak asal Irak meminta suaka kepada Umar. Di Madinah, mereka mendapat tempat berlindung. Sedangkan sumber sejarah lain menyebutkan alasan pemberhentian Umar adalah karena ia tidak setuju Al-Walid menggeser Sulaiman saudaranya sebagai putra mahkota dan menggantikan posisinya dengan Abdul Aziz putranya. Pemberhentiannya sebagai wali kota Madinah sangat mempengaruhi kejiwaannya. Ia merasa sakit hati karenanya. Ia khawatir termasuk golongan yang diusir dari Madinah.²⁹

Umar bin Abdul Aziz pun kembali ke Syam dan tidak menduduki jabatan resmi apapun selama sisa era Al-Walid. Ketika Al-Walid meninggal dunia dan Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah pada 96 H-99 H. Jadilah Umar orang terdekatnya, pendukung utama dan penasehatnya. Ia senantiasa menemaninya selama masa pemerintahannya.³⁰ Ibnu sirin berkata, “Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Sulaiman yang telah memulai kekhalifahannya dengan

²⁸Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 215.

²⁹Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 216.

³⁰*Ibid*,...hlm. 217.

menghidupkan shalat dan mengakhirinya dengan mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Sulaiman wafat pada 99 H dan Umar menshalatkan jenazahnya.³¹

Pada masa pemerintahan Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz banyak memberikan pengaruh kepadanya, ketika Sulaiman menjadi khalifah ia langsung mengangkat Umar menjadi menteri dan penasihatnya, bahkan menjadi orang yang selalu ada didekatnya, baik saat bepergian maupun tidak. Karena Sulaiman sangat membutuhkan Umar dalam masalah-masalah kecil maupun masalah besar.³² Sulaiman terkesan dengan kepribadiannya, pemikirannya, caranya dalam mengeluarkan keputusan dan sikap Umar dalam menghalangi Al-Walid dalam mencabut Sulaiman sebagai pengganti khalifah setelahnya. Sehingga Sulaiman sangat berterima kasih dan memberikan tongkat kekhalifahan setelahnya kepada Umar.³³

4. Usaha dan Jasa-jasa Umar bin Abdul Aziz saat menjadi Khalifah

Adapun Usaha-usaha yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sewaktu menjadi Khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang Agama, Umar bin Abdul Aziz menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan sunnah, mengadakan kerja sama

³¹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hlm. 27.

³²Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shoufau Qolbi (Jakarta:Pustaka Al-kausar, 2010), hlm.42.

³³*Ibid*,...hlm. 43.

dengan Ulama besar seperti Al-hasan Al-Bashri dan Sulaiman bin Umar. Dan menerapkan Hukum syariah Islam dengan serius.³⁴

Partisipasi para ulama pada pemerintahan Umar sangatlah luas jangkauannya, tidak ada tandingannya pada masa dinasti Umayyah. Salah satu alasannya adalah kegigihan Umar untuk berusaha selalu dekat dengan para ulama. Ia bahkan mengangkat para ulama untuk menjadi pendampingnya, menteri dan lain sebagainya.³⁵

2. Dalam bidang politik, menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan diatas segalanya. Mengirim utusan ke berbagai negeri untuk melihat langsung cara kerja gubernur dalam rangka menegakkan kebenaran. Memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zhalim terhadap rakyat.³⁶

Ketika Umar diangkat sebagai khalifah, hal-hal pertama yang dilakukannya adalah menghentikan perluasan wilayah Islam (ekspansi Islam) di daerah-daerah perbatasan negara dan menarik mundur pasukan-pasukan Islam dari medan-medan pertempuran.³⁷ Penghentian perluasan wilayah Islam yang dilakukan oleh Umar dengan cara berperang diubah

³⁴Abdurrahman bin Abdul Karim, *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in* (Jember: Diva Press, 2014), hlm. 543.

³⁵ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shoufau Qolbi (Jakarta:Pustaka Al-kausar, 2010), hlm.294.

³⁶*Ibid*,... hlm. 544.

³⁷ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, hlm. 401.

dengan metode perluasan itu dengan cara berdialog dan penuh perdamaian.³⁸ Artinya Ekspansi Islam diubah menjadi Futuhat Islamiyah.

3. Dalam bidang ekonomi, mengurangi beban pajak. Memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan sumur, pembuatan sumur-sumur dan pembangunan jalan raya. Menyantuni fakir miskin dan anak yatim.³⁹

Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, ia segera menghapuskan berbagai macam bentuk perpajakan yang tidak sesuai dengan syariat. Umar juga mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru dan memperbaiki lahan yang sudah ada untuk dijadikan lahan pertanian. ia juga tidak segan-segan memberikan pinjaman kepada para petani. bahkan ia juga menyediakan fasilitas umum untuk mempermudah para pedagang, petani dan para muusafir.⁴⁰

Adapun jasa-jasa Umar bin Abdul Aziz antara lain:

1. Menciptakan perdamaian yang dilandasi ajaran Islam,
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Melindungi Hak asasi manusia
4. Menyusun Undang-undang tentang pertahanan
5. Membangun tanah pertanian beserta sistem pengairannya

³⁸ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, hlm. 404

³⁹ *Ibid*,...hlm. 544.

⁴⁰ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, hlm. 435-436.

6. Membangun masjid-masjid sebagai syiar islam
7. Menyediakan dana khusus untuk menolong orang-orang miskin
8. Melakukan pembukuan terhadap hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.⁴¹

B. Sistem Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Untuk memuluskan jalannya roda pemerintahan, pengayoman terhadap masyarakat, serta penerapan keadilan dan kebenaran, Umar bin Abdul Aziz mengangkat para gubernur yang terpercaya, terpilih dan terbaik. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang dapat mengemban amanah, berilmu, teguh, rendah hati, menjaga kesucian diri, adil, baik perilakunya, penyayang, menjadi tauladan yang baik, mau menerima pendapat orang lain, mau meminta nasehat dari orang yang lebih pandai, tidak egois, berkecukupan, cerdas dan bijaksana.⁴²

Para pegawai dan pejabat yang diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz , terutama mereka yang menjadi wakil khalifah di daerah-daerah, adalah antara khalifah dan rakyatnya. Bagaimana pun kerasnya usaha khalifah untuk menerapkan siasat yang telah direncanakannya namun tetap saja rencana itu tidak

⁴¹*Ibid*,...hlm. 545.

⁴²Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 343.

akan berhasil dengan baik jika ia tidak dibantu oleh bawahannya, oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz sangat teliti dalam memilih pegawai dan pejabatnya.⁴³

1. Mengangkat Gubernur yang Adil

Sebagian besar ulama menegaskan bahwa semua pejabat yang diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz adalah orang-orang terpercaya, diantaranya adalah:

a. Al-Jarrah bin Abdillah Al-Hakami (Gubernur Khurasan dan Sinjistan)

Adz-Dzahabi berkata “Al-Jarrah adalah seorang panglima perang dan komandan batalion. Nama lengkapnya adalah Abu uqbah Al-Jarrah bin Abdillah Al-hakami. Dia pernah diangkat menjadi gubernur Bashrah oleh Al-Hajjaj, kemudian diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Khurasan dan Sijistan. Dia adalah seorang pahlawan yang pemberani dan wibawa, dia juga seorang muslim yang taat beribadah dan menghafal Alquran, dan dia juga seorang yang terpandang”.⁴⁴

b. Adi bin Artha’ah Al-Fazari (Gubernur Bashrah)

Adi diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menjabat sebagaigubernur wilayah bashrah. Dia termasuk salah seorang perawi hadits ysnng meriwayatkan dari Amr bin Abasah dan Abu Umamah. Umar bin Abdul aziz pun sering meminta berbagai nasihat dan masukan darinya.

⁴³Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shoufau Qolbi (Jakarta:Pustaka Al-kausar, 2010), hlm.509.

⁴⁴ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 344.

- c. Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khathab (Gubernur Kufah)

Abdul Hamid adalah seorang pemimpin yang terpercaya dan adil. Dia sering disebut dengan panggilan Abu Umar Al-Adawi Al-Khatabi Al-madani. Dia diangkat sebagai gubernur wilayah kufah oleh Umar bin Abdul Aziz. Abdul Hamid tidak banyak meriwayatkan hadits, namun ia adalah seorang yang sangat tepandang di mata masyarakat.⁴⁵

- d. Umar bin Habirah (Gubernur Al-jazirah)

Umar bin Habirah adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan pemberani. Dia adalah penduduk Syam yang diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur untuk wilayah Al-Jazirah pada tahun 100 H. Jabatan gubernur Al-Jazirah masih terus dipercayakan kepada Umar bin Habirah sehingga kekhalifahan berpindah ke tangan Yazid bin Abdul Malik, oleh Yazid kemudian dia diangkat menjadi gubernur di daerah Irak dan Khurasan.

- e. Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm (Gubernur Madinah)

Ibnu Hazm adalah salah satu Ulama besar yang terpercaya, dia diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur untuk wilayah Madinah sekaligus menjadi hakim disana. dikatakan bahwa ia adalah orang yang paling pandai dalam masalah hukum pada zamannya.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*,... hlm. 345.

⁴⁶ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,... hlm. 345.

f. Abdul Aziz bin Abdullah bin usaid Al-Umawi (Gubernur Mekah)

Umar bin Abdul Aziz memercayakan jabatan gubernur Mekah kepada Abdul Aziz bin Abdullah bin Al-Umawi, wali dari Sulaiman bin Abdul Malik. Dia juga seorang perawi hadits, bahkan dia dikategorikan sebagai perawi yang terpercaya oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban. Dia wafat pada masa kekhalifahan Hisyam bin Abdul Malik.⁴⁷

g. Abdul Malik bin Rifa'ah bin Khalid bin Tsabit Al-fahmi (Gubernur Mesir)

Ibnu Taghri Bardi menyebutkan sebuah riwayat tunggal bahwa Umar bin Abdul Aziz mengangkat Abdul Malik bin Rifa'ah bin Khalid bin Tsabit al-Fahmi Al-Masri sebagai gubernur Mesir. Dia memiliki catatan hidup yang baik, sederhana, dihormati, terpercaya, dan adil terhadap masyarakat. Pada tahun 99 H dia dipecat dari jabatannya tanpa disebutkan alasannya, kemudian digantikan oleh Ayub bin Syurahbil bin Aksum bin Abrahah bin Ash-Shabah.

h. Ismail bin Ubaidillah bin Abi Al-Muhajir Al-Makhzumi (Gubernur Maroko)

Ismail adalah orang yang salih, terhormat, dan zuhud. Dia datang ke wilayah Afrika (tepatnya Maroko) pada tahun 99 H. Namun ada juga yang mengatakan pada 100 H. Dia memiliki catatan hidup yang baik, dia memimpin dengan menerapkan prinsip keadilan dan kebenaran, hingga banyak sekali kaum Barbar yang masuk agama islam melalui tangannya.

⁴⁷Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 346.

i. As-Samah bin Malik (Gubernur Andalusia)

Dia adalah seorang pemimpin yang masyhur. Dia diberi kepercayaan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk memimpin wilayah Andalusia. Umar memrintahkan kepadanya untuk memisahkan antara wilayah islam dengan wilayah lainnya yang belum sepenuhnya dikuasai oleh negara islam dan memerintahkannya untuk mengambil seperlima *fai'* yang diwajibkan atas penduduk disana karena telah masuk wilayah islam dengan suka rela.⁴⁸

2. Perencanaan dalam Pemerintahan Umar bin Abdul aziz

Umar bin Abdul Aziz tidak pernah memutuskan permasalahan kecuali ia merencanakan terlebih dahulu, memperkirakan akibat yang akan terjadi kemudian mempertimbangkan dengan penuh perhitungan. Barangkali kekhawatiran Umar yang disampaikan kepada Raja' yang menjadikannya begitu mementingkan sebuah perencanaan. Dia pernah berkata kepada Raja', "Wahai Raja', sesungguhnya aku ini punya akal, aku khawatir Allah akan memberi azab kepadaku atas segala pemikiran yang ada di otakku ini."

Dalam perencanaan yang dilakukan oleh Umar dia selalu menentukan tujuan yang jelas, memilih kebijakan yang akan dibuat, menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dan barulah melakukannya. Poin pertama dalam perencanaan Umar adalah

⁴⁸ *Ibid*,...hlm. 346.

menentukan tujuan yang jelas, tujuan yang paling utama yang ingin dicapainya adalah melakukan reformasi dan pembaharuan yang bijaksana sesuai dengan ketentuan Nabi dan Khulafaurrasyidin. Serta melaksanakan unsur penunjang tercapainya tujuan utama tersebut. Misalnya menegakkan keadilan dan kebenaran, menghapus kezaliman, mengembalikan keharmonisan antara manusia dengan alam dan kehidupan, serta keharmonisan dengan pencipta dari keduanya, dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Islam.

Umar juga menjadikan kebijakan politik sebagai salah satu unsur penunjang perencanaan. Hal ini dapat terlihat jelas dalam praktek perencanaan administrasi pemerintahan yang dilakukan Umar dan yang paling jelas terlihat dalam hal ini adalah keteguhan Umar dalam berpegangan terhadap ajaran Alquran dan sunnah. Serta penolakannya terhadap perdebatan yang terjadi dalam perkara Syariat dan Agama, karena posisinya sebagai pimpinan yang melaksanakan hukum. Berkaitan dengan membangun etos kerja, Umar telah menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelaksana hukum bukan pembuat baru. Dia hanya ingin menegakkan ajaran agama dan menegaskan bahwa ketaatan itu hanya ditujukan terhadap orang yang taat kepada Allah. Semua tindakan dan kebijakan yang diambil harus didasarkan pada penegakan keadilan,

melakukan perbaikan, menyebarkan kebaikan dan bukan menzalimi. Berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan.⁴⁹

3. Struktur Organisasi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Struktur organisasi pada pemerintahan Umar dibuat untuk melengkapi perencanaan guna membangun segala kebutuhan birokrasi untuk melaksanakan setiap rencana.. Umar menjadikan struktur negara ini sebagai salah satu hal terpenting dalam menjalankan sebuah negara, bahkan dia menunjukkan sikapnya terkait struktur organisasi ini layaknya seorang administrator.

Berikut ini adalah struktur organisasi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz;

a. Tingkat I

Kepala negara, Khalifah Umar bin Abdul Aziz

b. Tingkat II

Para Penasihat dan Pembantu Khalifah

Pemegang Stempel Negara

Sekretaris Negara

Penerima Tamu Negara

Pertahanan Negara

Kepolisian Negara

⁴⁹ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 352.

c. Tingkat III

Pengurus *Kharraj* dan Tentara

Percetakan Uang Emas dan Perak

Departemen Pos

Gubernur

Pengurus Baitul Mal Pusat

Departemen Pajak

Lembaga Zakat dan Sedekah

d. Tingkat IV

Hakim para Mufti dan Guru

Sekretaris Daerah

Pengurus *Kharraj* Daerah

Lembaga Zakat dan Sedekah Daerah

Departemen Pos Daerah

Kepolisian Daerah

Pengurus Perizinan

Lembaga Urusan Peperangan (jika diperlukan)⁵⁰

⁵⁰Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 353.

4. Pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan

Umar bin Abdul Aziz secara langsung mengawasi sendiri apa yang terjadi di dalam pemerintahan yang dipimpinnya, dari persoalan yang kecil hingga persoalan yang besar. Dia selalu mengikuti perkembangan dari para pejabat dan pegawainya di daera-daerah. Umar memanfaatkan bantuan dari lembaga negara yang dikembangkan sejak pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan, seperti surat-menyurat dan badan intelijen yang tersebar di seluruh pelosok daerah yang digunakan oleh para khalifah untuk memperoleh informasi dari semua wilayah di negaranya. Meskipun Umar sudah berupaya semaksimal mungkin untuk teliti dalam memilih para pemimpin daerah, namun itu tidak meghalangnya untuk terus mengikuti perkembangan rakyat dan mengawasi tata kelola pemerintahan.⁵¹

Umar memang banyak menggunakan waktunya untuk membuat rancangan kebijakan reformasi yang meliputi semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, administrasi pemerintahan dan lain sebagainya. Umar memerintahkan kepada para pemimpin daerah untuk menerapkan sistem tersebut di daerah masing-masing, dia juga sering memberi arahan-arahan yang mendidik dengan mengingatkan mereka besarnya tanggung jawab yang mereka pikul di bahu mereka, mengingatkan mereka untuk takut kepada Allah, merasaselalu dalam

⁵¹ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 348.

pengawasan-Nya, dan selalu mendorong mereka untuk bertakawa kepada-Nya dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.⁵²

Pengawasan ketat yang dilakukan oleh Umar dan petunjuk yang mendetail yang diberikan kepada para pejabatnya, telah menciptakan kondisi yang stabil di seluruh wilayah. Keduanya juga membuat para pegawai dan pejabatnya selalu dalam keadaan siap untuk bekerja dengan baik.⁵³

5. Pencegahan kekacauan administrasi pada Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Ali Muhammad Ash-Shallabi memaparkan bahwa Umar bin Abdul Aziz bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan terhindar dari kekacauan Administrasi dengan berusaha mencegah dan memblokir setiap akses yang dapat meracuni administrasi, seperti pengkhianatan, kebohongan, pemborosan, penyuapan, pemberian hadiah untuk para pemimpin, keterlibatan para pejabat dalam perniagaan, ketertutupan para pejabat dari masyarakat, dan beberapa hal lain.

1. Menaikkan gaji pegawai

Hal pertama yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz untuk menyelamatkan negara dari tindakan korupsi adalah dengan

⁵²*Ibid*,...hlm. 349.

⁵³*Ibid*,...hlm. 350.

mensejahterakan bawahannya, walaupun sebenarnya dia terbilang sangat hemat terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Untuk mensejahterakan mereka Umar bin Abdul Aziz memutuskan untuk menaikkan gaji mereka, sebagian ada yang diberikan seratus dinar dan ada juga yang diberikan dua ratus dinar perbulan, dia berpikir jika semua pejabat merasa cukup dengan gajinya mereka akan lebih konsentrasi dalam melayani masyarakat.

2. Mencegah kebohongan

Maimun bin Ibrahim meriwayatkan suatu ketika dia masuk ke rumah Umar yang sedang menerima seorang pegawai dari daerah kufah. Dia melihat Umar sedang marah kepadanya, lalu dia bertanya “Apa yang terjadi wahai amirul mukminin?” Umar menjawab, “Dia memberitahukan kepadaku bahwa jika ada seorang saksi palsu diwilayahnya, dia pasti akan memotong lidahnya”, lalu Maimun berkata, “dia tidak mungkin melakukan hal itu.” Umar pun berkata “perhatikanlah apa yang dikatakan oleh syaikh ini. Sesungguhnya jika ada dua tempat dan salah satunya yang paling baik dari keduanya adalah kebohongan, berarti kedua tempat tersebut adalah tempat yang buruk.” Dengan demikian Umar berusaha untuk memutuskan pangkal keburukan suatu pemerintahan dengan memberikan peringatan untuk mencegah diri dari hal-hal yang dapat menggiring kepada kebohongan dan menghindar dari kebohongan dalam mengambil keputusan.

3. Melarang untuk menerima gratifikasi dan hadiah

Ketika ada yang mengatakan kepada Umar, “Bukankah Rasulullah pernah menerima hadiah?” Umar menjawab, “Memang benar, namun bagi kita dan bagi para pejabat setelah kita, hadiah itu berubah menjadi suap.” Umar juga memperingatkan kepada para pejabat dan pegawainya untuk tidak pernah menuruti keinginan khalifah atau keluarganya yang berkaitan dengan hadiah.

4. Larangan berlebih-lebihan dan bersifat boros

Banyak sekali ketetapan yang diputuskan oleh Umar bin Abdul Aziz yang memperlihatkan betapa dia sangat berhati-hati dalam penggunaan dana umum kaum muslimin. Oleh karenanya, hal pertama yang dilakukan saat dia diangkat menjadi khalifah adalah menyingkirkan segala fasilitas kekhalifahan.

5. Melarang pejabat terlibat dalam perniagaan

Umar bin Abdul Aziz pernah menuliskan surat kepada para pejabatnya yang mengatakan, “kami memutuskan agar para pemimpin sebaiknya tidak berniaga dan kami menetapkan agar para pegawai tidak melakukan aktifitas perniagaan. Karena jika seorang pemimpin dan pejabat berniaga, dia akan memberikan pengaruh negatif pada pasar dan membuat sesuatu yang akan berakibat kekacauan, walaupun dia berusaha keras untuk tidak melakukannya.”

6. Membuka jalur komunikasi antara pemimpin dan masyarakat

Keberadaan beberapa pengawal yang biasanya mengelilingi khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz telah menghalangi masyarakat untuk mengadu atau menyampaikan sesuatu kepada pemimpin mereka. Lain halnya ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, dia bahkan menjanjikan hadiah dan memberikan sejumlah uang bagi siapa yang melapor kepadanya tentang keadaan sesungguhnya. Atau menunjukkan sesuatu kepadanya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi negara dan masyarakat umum. Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan kepada para pejabatnya untuk membuka jalur komunikasi antara mereka dengan masyarakat agar mereka dapat mendengar keluhan dari masyarakat dan mengetahui keadaan mereka.

7. Memperhitungkan dana baitul mal yang dinikmati oleh para pejabat sebelumnya

Tidak lama setelah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, dia memerintahkan penahanan terhadap mantan gubernur Khurasan, Yazid bin Mahlab. Ketika yazid disidangkan Umar menanyakan tentang dana yang diberikan oleh khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdil Malik, Yazid mengatakan “seperti engkau ketahui aku memiliki tempat khusus disisinya, aku selalu melaporkan apapun kepadanya dan aku adalah orang yang paling didengar dan dipercayai olehnya. Sepanjang pengetahuanku, dia tidak pernah mengambil apapun dari negara dan tidak

pernah melakukan apapun yang tidak aku sukai.” Kemudian Umar berkata “aku tidak ada pilihan kecuali memenjarakanmu”. Umar bin Abdul Aziz selalu mencari informasi tentang bawahannya, dia mengawasi mereka dan memberi perhitungan apabila terjadi kesalahan dari mereka.⁵⁴

6. Prinsip Pembagian Tugas pada Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz telah menginsyaratkan secara jelas adanya prinsip pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Salah satu surat yang ditulis Umar kepada Uqbah bin Zur’ah Ath-Tha’i setelah mengangkatnya sebagai petugas pengumpul Kharraj untuk wilayah Khurasan, menyebutkan “pemerintahan itu terdiri dari beberapa pondasi yang tidak akan kokoh bangunannya kecuali dengan adanya pondasi-pondasi tersebut. Seorang gubernur adalah pondasi utama, seorang hakim adalah pondasi kedua, pengurus baitul mal adalah pondasi ketiga dan pondasi keempat adalah aku (Khalifah).”

Ini adalah pembagian pokok yang bersifat umum, yang tidak lain adalah gubernur yang memimpin daerah-daerah, hakim yang memimpin peradilan, pengurus baitul mal yang mengurus seluruh keuangan negara, dan khalifah yang menjadi kepala negara dan pimpinan tertinggi. Dalam bidang pendidikan dan pengetahuan Umar telah mendirikan majlis-majlis ilmu permanen di berbagai masjid, serta menugaskan beberapa orang untuk

⁵⁴Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 355-359

mengajar dan memberikan pemahaman agama kepada masyarakat. Selain itu, Umar juga mengangkat beberapa orang ulama untuk mengisi jabatan resmi dalam urusan peribatan, misalnya untuk mengurus shalat dan haji, serta mengurus surat menyurat dan masih banyak lagi jabatan-jabatan lain.⁵⁵

⁵⁵Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hlm. 369-370.

C. Sistem Good Governance Umar bin Abdul Aziz

1. Musyawarah dalam Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Allah berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 38, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya;

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.⁵⁶

Allah juga berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 159, yaitu;

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.⁵⁷

⁵⁶ Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm. 789.

⁵⁷ Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm. 103.

Umar bin Abdul Aziz sangat memerhatikan pelaksanaan prinsip musyawarah dalam kekhalifahannya. Diantara perkataannya tentang musyawarah.

“Sesungguhnya musyawarah dan tukar pikiran adalah pintu rahmat dan keberkahan, keputusan yang diambil berdasarkan keduanya tidak akan salah, dan keteguhan hati tidak akan hilang bersama keduanya.”

Prinsip musyawarah terlihat jelas pada hari pertama kekhalifahannya.

Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada rakyatnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya aku sedang diuji dengan jabatan ini tanpa dimintai kepadaku tentangnya, bukan juga aku yang memintanya, dan juga berdasarkan musyawarah kaum muslimin. Sesungguhnya aku tidak memaksa kalian untuk memba’atku, oleh karena itu pilihlah orang yang pantas memimpin kalian”. Seketika itu juga, serentak mereka berteriak, “Sungguh kami telah memilih engkau wahai amirul mukminin, dan kami ridha dengan kepemimpinanmu. Oleh karena itu pimpinlah kami dengan adil dan baik.”

Dengan demikian, Umar keluar dari prinsip pewarisan kepemimpinan yang diterapkan oleh sebagian besar khalifah bani umayyah kepada prinsip musyawarah.⁵⁸

⁵⁸ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 35.

2. Keadilan dalam Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, yaitu;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁵⁹

Allah memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang sudah pasti kewajibannya. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 135, yaitu;

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْزِضًا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.⁶⁰

Umar bin Abdul aziz telah melakukan pilar besar dan prinsip penting ini dengan sangat sempurna. Menurut pendapat umar, tanggung jawab dan kekuasaan itu sebenarnya melaksanakan hak-hak rakyat, tunduk pada syarat-syarat baiat

⁵⁹Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm. 415.

⁶⁰Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm. 144.

mereka, serta mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Seorang khalifah adalah pelayan umat dan dia harus melaksanakan tuntutan mereka dengan adil sesuai dengan syarat-syarat baiat.

Ada banyak hal yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam untuk menegakkan keadilan, yaitu;

1. Mengembalikan hak kepada yang berhak

Umar mengumumkan kepada seluruh rakyat bahwa siapapun yang memiliki hak pada gubernur atau salah seorang bani umayyah atau hartanya pernah diambil secara zalim oleh salah seorang dari mereka, hendaklah segera menghadap Umar bersama bukti-bukti agar Umar dapat menembalikan haknya.

2. Memecat semua gubernur yang zalim

Ketika Umar bin Abdul Aziz menduduki kursi kekhalifahan, dia memecat semua gubernur dan pejabat yang zalim dari jabatan mereka. Seperti itulah Umar memecat orang-orang yang zalim dan begitulah caranya dalam memilih gubernur, hakim, sekretaris, dan lain-lain. Dia selalu mencari orang yang paling baik dalam beragama dan menjaga amanah. Namun Umar tidak hanya melihat penampilan luar seseorang, akan tetapi dia pun akan mengujinya.

3. Menghentikan kezaliman terhadap kaum mawali

Kaum mawali adalah para budak yang telah dimerdekakan, pada masa sebelum Umar bin Abdul Aziz, mereka mengalami banyak kezaliman, mereka yang sudah memeluk islam tetap diwajibkan membayar jizyah,

dan mereka juga dilarang untuk meninggalkan kampung halamannya (Hijrah). Ketika Umar menjadi khalifah dia langsung menghentikan kezaliman yang dialami oleh kaum mawali.

4. Menghapus *Al-Makas* (retribusi)

Ketika retribusi dianggap sebagai salah satu bentuk kezaliman dan penganiayaan karena merupakan pajak yang diambil dari orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, dan ketika zakat, jizyah dan pajak atas ahlu dzimmah dianggap sudah cukup, maka Umar melarang keras penarikan retribusi.

5. Mengembalikan harta yang didapat secara zalim dan membayar zakat

Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua harta yang didapat secara zalim yang ada diseluruh Baitul Mal dan mengambil zakatnya untuk satu tahun saja.⁶¹

⁶¹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 45-56.

3. Persamaan Derajat pada Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat Ayat 13, yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁶²

Umar bin Abdul Aziz telah mempraktikkan prinsip persamaan derajat ini pada masa pemerintahannya. Indikator pertama yang menunjukkan bahwa dia sangat berambisi untuk menerapkan prinsip persamaan ini derajat adalah ketika dia bersumpah bahwa dia sangat ingin menyamakan kehidupannya dan kerabatnya dengan kehidupan kaum muslimin yang lainnya. Umar bin Abdul Aziz juga sangat menjadikan prinsip persamaan derajat bagi kaum muslimin dalam hak dan kewajiban mereka dalam seluruh sektor kehidupan. Dia tidak memberikan hak istimewa bagi pejabatnya, dia juga tidak memberikan kepada siapapun apa-apa yang bukan haknya. Umar menyamakan hak para pembesar Bani Umayyah dengan hak kaum Muslimin seluruhnya. Dia tidak memberikan hadiah dan pemberian khusus kepada bani Umayyah.

⁶²Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm. 874.

Dengan demikian, politik ekonominya berlandaskan pada prinsip persamaan. Baitul mal adalah hakkaum muslimin seluruhnya. Umar bin Abdul Aziz telah menerapkan prinsip persamaan diantara kaum muslimin sampai pada perkara-perkara umum, diantaranya adalah perintahnya supaya orang-orang tidak mengkhususkan doa dan shalawat mereka hanya untuk sebagian kaum muslimin saja.

Ali Muhammad Ash-Shallabi memaparkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menyadari bahwa perbedaan sosial yang terjadi didalam masyarakat adalah akibat dari buruknya pembagian kekayaan, untuk menghapuskan kemiskinan dan kezaliman, Umar melarang pejabat negara dan para pembesar untuk mengambil keuntungan dari kekayaan masyarakat, lebih memprioritaskan orang-orang tersisih dan miskin serta lebih memperhatikan dan menjamin kecukupan mereka baik melalui zakat maupun penyaluran dalam bentuk lainnya.⁶³

4. Kebebasan pada Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Prinsip kebebasan merupakan salah satu prinsip utama di dalam hukum pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Prinsip ini memberikan jaminan kebebasan bagi seluruh umat manusia di bawah naungan syariat islam, selama kebebasan itu tidak bertentangan dengan syariat. Umar sangat memperhatikan segala bentuk kebebasan manusia. Dia memperlihatkan segala bentuk kebebasan

⁶³ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shoufau Qolbi (Jakarta:Pustaka Al-kausar, 2010), hlm.425.

manusia, lalu ia mengakui kebebasan yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan kebebasan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka dia menyerahkannya kepada dewan kajian ajaran Islam. Beberapa kebebasan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz:

1. Kebebasan berfikir dan beragama

Umar bin Abdul Aaziz sangat ingin menerapkan prinsip kebebasan beragama di kalangan masyarakat. Kebijakannya terhadap kaum yahudi dan nasrani menuntutnya untuk menepati janji-janjinya kepada mereka, menegakkan keadilan bagi mereka, menghentikan kezaliman bagi mereka, dan tidak menyulitkan mereka dalam hal beragama. Allah berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 256, yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*⁶⁴

Sedangkan kebebasan berpikir merupakan kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Kebebasan ini telah mengambil tempat yang

⁶⁴Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm. 63.

luas dalam administrasi negara, karena Umar telah memberikan kebebasan kepada seluruh pejabat dan rakyatnya.

2. Kebebasan berpolitik

Umar bin Abdul Aziz juga telah mengumumkan kebebasan berpolitik yang telah diberikan Islam kepada kaum muslimin, karena tidak ada ketaatan bagi siapa pun dalam bermaksiat terhadap Allah, walaupun orang itu adalah hakim ataupun pejabat. Kebebasan berpolitik dibagi menjadi dua bentuk, yaitu

Pertama, keikutsertaan dalam memilih pemimpin melalui *ahlu al-hilli wa al- 'aqdi*, baiat dari kaum muslimin, dan keridhaan mereka terhadapnya.

Kedua, menyatakan pendapat dan nasihat terhadap para pemimpin, serta kritikan terhadap pekerjaan mereka dengan pertimbangan hukum Islam.

3. Kebebasan individu

Umar bin Abdul Aziz berusaha merealisasikan kebebasan individu bagi seluruh umat Islam, karena dia melihat beberapa larangan yang berkaitan dengan hijrah atau yang disebut dengan kebebasan berpindah tempat. Maka Umar membukakan pintu hijrah kepada siapapun yang menginginkannya.

4. Kebebasan berniaga dan bekerja

Kebebasan berniaga, bekerja, dan mencari karunia Allah di darat dan di laut merupakan bagian dari kebebasan ekonomi. Umar bin Abdul Aziz telah menegaskan dalam sebuah suratnya kepada pejabatnya tentang kewajiban memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam berinvestasi dan melakukan jual beli baik di darat maupun di laut. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jatsiyah ayat 12, yaitu;

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya:

*“Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur”.*⁶⁵

Kebijakan Umar dalam mengembalikan hak dan memberikan kebebasan ekonomi yang tepat telah membuahkan hasil. Kebebasan ini memberi peluang yang luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kerja dan produksi serta menghilangkan hambatan untuk mencapai peningkatan kerja dan produktivitas.⁶⁶

⁶⁵ Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), hlm. 816.

⁶⁶ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 61-66.

5. Tanggung jawab pada Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Riwayat-riwayat menyebutkan secara mutawatir bahwa Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan hal ini. Dia merasakan besarnya tanggung jawab dan beratnya beban sejak detik pertama dia menerima jabatan khalifah.

Umar pernah berkata; “Aku bukanlah orang yang paling baik diantara kalian, tetapi Aku adalah orang yang paling berat bebannya diantara kalian.”

Umar bin Abdul Aziz juga meminta bawahannya untuk memilih orang-orang yang memiliki kemampuan dan taat beragam bila hendak memberikan suatu tugas yang berkaitan dengan kaum muslimin. Umar memimpin rakyatnya dengan kebijakan yang penuh kasih sayang, menciptakan kehidupan yang tenteram bagi mereka dan menghindarkan mereka dari kehinaan memintaminta. Dia membagikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Umar juga meminta kepada bawahannya untuk membiayai orang yang hendak melaksanakan ibadah haji.⁶⁷

Umar sangat bertanggung jawab terhadap kekhalifahan yang dipimpinnya.

Suatu ketika Roja bin Hayah bertanya: “Wahai Amirul Mukminin, engkau telah menggunakan seluruh siangmu untuk kesibukan, maka mengapa bagian malam ini engkau gunakan untuk berdiskusi dengan kami?” Umar menjawab: “Wahai Roja, sesungguhnya bertatap muka dengan orang-orang seperti ini dapat membuka pikiran, dan sesungguhnya berkonsultasi dan berdiskusi itu merupakan pintu rahmat dan kunci berkah, jika keduanya digunakan maka tidak akan ada pendapat yang akan menyesatkan, dan dengan keduanya pula kita dapat meraih keteguhan hati”.⁶⁸

⁶⁷Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 87.

⁶⁸Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shoufau Qolbi (Jakarta:Pustaka Al-kausar, 2010), hlm. 466.

D. Peluang dan Tantangan Umar bin Abdul Aziz

1. Peluang dalam Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

a. Keterlibatan Para Ulama dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik merupakan awal dari keterlibatan para ulama dalam mengemban tanggung jawab negara. Pada masa Umar bin Abdul Aziz keterlibatan para ulama dalam pelaksanaan urusan negara menjadi lebih kuat dan efektif. Mereka diberikan tanggung jawab yang lebih luas dan beraneka ragam bentuknya. Partisipasi Para ulama dalam mengemban tanggung jawab diperluas ke pelbagai urusan kenegaraan, sehingga mereka diberi pelbagai tugas dan jabatan, pemerintahan pada masa Umar dapat dikatakan pemerintahannya para ulama. pemerintahan umar adalah contoh pemerintahan yang baik untuk sebuah negara islam, dimana kekuatan legislatif dan eksekutif berjalan seiring membentuk kombinasi yang sangat sempurna. Partisipasi ulama pada masa Umar sangat luas jangkauannya sehingga tidak adaandingannya pada masa dinasti umayyah.⁶⁹

b. Dukungan para ulama terhadap Umar bin Abdul Aziz

Para Ulama memiliki kontribusi dalam membantu umar menjalankan metode perbaikan, mereka menolong dan membantunya dalam mengambil keputusan pembenahan itu, bahkan sebagian dari mereka ikut dalam pengambilan keputusan. Salah satu diantaranya adalah ‘Irak bin

⁶⁹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm. 198-199.

malik, yang merupakan sahabat Umar yang paling keras terhadap keturunan Bani Marwan yang banyak mengambil keuntungan dari perpajakan atau juga harta masyarakat yang diambil secara zalim. Ulama lain yang dekat dengan Umar adalah Maimun bin Mahran. Dia dipercayai oleh Umar bukan hanya karena keilmuannya namun juga karena pengalamannya, karena usia Maimun bin Mahran dua puluh tahun lebih tua daripada Umar.⁷⁰

c. Banyaknya Nasihat Para Ulama kepada Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang paling banyak diberikan masukan dan nasihat diantara semua khalifah bani umayyah. Kesimpulan ini diambil dengan melihat banyaknya surat yang terkirim antara khalifah dan para ulama. Contohnya seperti Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khathab, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurahzi, Abu Hazim Salamah bin Dinar, Qasim bin Mukhaimarah, Hasan Al-Basri, dan lain-lain.

Adapun nasihat yang mereka berikan kebanyakan terkat dengan metode kebijakan Umar dalam berpolitik. Salah satu bukti bahwa Umar bin Abdul Aziz menjalankan pemerintahannya berdasarkan nasihat-nasihat dari para ulama tersebut dapat dilihat dari isi nasihat dan siasat yang dijalankan dalam kesehariannya. Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurahzi, "Wahai Amirul mukminin, bukalah pintumu untuk masyarakat, permudahlah

⁷⁰Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 200.

birokrasi ”, belalah orang-orang yang terzalimi dan kembalikanlah harta mereka yang diambil secara zalim kepada pemilik aslinya.⁷¹

d. Berperannya Para Ulama dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Partisipasi para ulama terhadap kinerja Umar bin Abdul Aziz tidak hanya sebatas memberi petunjuk dan nasehat, namun mereka juga bersedia untuk diberikan tanggung jawab memangku berbagai jabatan di dalam struktur pemerintahan Umar. Posisi paling penting dan paling banyak memberi pengaruh terhadap politik negara adalah jabatan gubernur di berbagai wilayah dan kepala Baitulmal.

Partisipasi yang begitu besar dari para ulama untuk memimpin berbagai wilayah atau untuk mengurus baitul mal atau untuk pekerjaan lain, tidak diragukan lagi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam memperbaiki pelayanan kemasyarakatan maupun perekonomian yang kemudian memberikan pengaruh yang sangat baik dalam kehidupan berpolitik pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz.⁷²

⁷¹Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 202.

⁷²*Ibid*,...hlm. 204-204.

2. Tantangan dalam Pemerintahan Umar bin Aziz

a. Pemberontakan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Banyak pemberontakan yang dipelopori kaum syiah terjadi. Yang termashur di antaranya adalah pemberontakan Mukhtar di kufah pada tahun 685-687 M. Ia mendapat banyak pengikut dari kalangan kaum *mawali*, yaitu umat islam bukan Arab, berasal dari persia, Armenia, dan lain-lain yang pada masa dinasti umayyah dianggap sebagai warga kelas dua, ia terbunuh dalam gerakan Abdullah ibn Zubair, namun ibn Zubair juga tidak berhasil menghentikan gerakan Syiah. Selain gerakan tersebut, gerakan-gerakan anarkis yang dilancarkan kelompok Khawarij dan Syiah juga dapat diredakan.⁷³

Adapun ketegasan Umar bin Abdul Aziz terhadap orang yang ingin memecah belah persatuan kaum muslimin dan mengkhianati mereka, Umar bin Abdul Aziz menggunakan metode dialog dan diskusi dengan mereka. Mereka yang ingin memecah belah kaum muslimin adalah kaum Khawarij yang telah melakukan pemberontakan terhadap bani umayyah dibawah pimpinan Syaudzab Al-Khariji (100 H).⁷⁴

Hubungan pemerintah dengan oposisi membaik pada masa Umar bin Abdul Aziz. Meskipun pemerintahannya yang singkat Umar berhasil

⁷³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.46.

⁷⁴Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*,...hlm. 82.

menjalin hubungan yang baik dengan golongan Syiah dan menjadikan kedudukan Mawali disejajarkan dengan Muslim Arab.⁷⁵

3. Akhir pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Hidup khalifah yang bijak ini tidak berlangsung lama, dia meninggal dunia sebelum ia melampaui usia empat puluh tahun. Tampaknya Umar bin Abdul Aziz terlalu bekerja keras dalam menangani urusan umat Islam dan terlampau sering bergadang untuk mengerjakan urusan negara, serta tidak memperhatikan makan dan minumannya. Tentu saja berdampak negatif bagi kesehatannya, ia pun menghadap Tuhannya dengan penuh ketenangan.⁷⁶

Ada beberapa riwayat berbeda mengenai penyebab sakit dan meninggalnya Umar. Salah satunya menyebutkan bahwa penyebabnya adalah rasa takut Umar kepada Allah dan terlalu giatnya dia bekerja memikirkan rakyatnya. Pada riwayat lain disebutkan bahwa penyebab kematian Umar adalah karena diberi minum racun. Hal itu dikarenakan bani Umayyah merasa tersingkirkan dan terhimpit oleh kebijakan yang diterapkan Umar. Kebijakan yang didasari atas semangat keadilan itu dirasakan oleh bani Umayyah sebagai penghalang dari berbagai kenikmatan fasilitas dan kesenangan yang tidak didapat oleh masyarakat lain pada umumnya. Bahkan harta yang sudah ada di tangan mereka hasil dari kezaliman terhadap

⁷⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*,...hlm. 47.

⁷⁶ Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014),hlm. 282.

masyarakat diambil kembali oleh Umar dan dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Umar telah menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan kenikmatan yang mereka inginkan, sehingga beberapa diantara mereka menyusun rencana untuk menaruh racun dalam minumannya.⁷⁷

Sepeninggalan Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan bani Umayyah berada dibawah kekuasaan khalifah Yazid ibn Abd Al-Malik (720-724 M). Penguasa yang satu ini terlalu cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian, pada zamannya berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid ibn Abd Al-Malik.⁷⁸

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwa sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz merupakan sebuah sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip Good Governance yang sesungguhnya, yaitu dengan menegakkan keadilan, mengutamakan prinsip musyawarah, menjunjung tinggi kesamaan derajat, memberikan kebebasan kepada rakyat dan adanya tanggung jawab atas kekuasaan yang dipegangnya. Dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz juga dilakukannya perencanaan dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, perencanaan dan pengawasan yang dilakukannya ini meliputi urusan-urusan yang kecil hingga besar.

⁷⁷Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR (Jakarta: Beirut, 2014), hlm.381.

⁷⁸Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 47.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari uraian-uraian sebelumnya, setelah menganalisis Sistem Pemerintahan *Good Governance* Umar bin Abdul Aziz, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dinasti Umayyah yang berusaha menghidupkan kembali Ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Dalam sistem pemerintahannya Umar berusaha mengangkat gubernur yang terpercaya, membuat perencanaan dan tujuan yang jelas serta melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahannya.
2. Upaya Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan *Good Governance* terlihat dalam praktik-praktik pemerintahan yang dilakukannya seperti menegakkan keadilan, menjalankan prinsip musyawarah, mempraktikkan prinsip persamaan derajat, menerapkan prinsip kebebasan dan sangat bertanggung jawab terhadap kekuasaan yang dipikulnya. Sehingga semua prinsip tersebut mampu membawa kehidupan kaum muslimin kepada sebuah pembaharuan.

3. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Umar bin Abdul Aziz dalam masa pemerintahannya seperti pemberontakan kaum Khawarij, Namun berkat dukungan dan partisipasi para ulama dan kaum muslimin dalam pemerintahannya semua pemberontakan dapat diatasinya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk melaksanakan prinsip *Good Governance* dalam setiap praktik pemerintahan. Pada penelitian ini telah membuktikan bahwa pelaksanaan prinsip *Good Governance* yang sesungguhnya akan membawa pada perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penerapan prinsip *Good Governance* benar-benar diterapkan dalam setiap praktik pemerintahan yang dijalankan.

2. Bagi Bidang Akademik

Penulis menyarankan bagi para akademisi agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian ini dikembangkan guna melahirkan pengetahuan baru tentunya yang berhubungan dengan Sistem pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.

Abdurrahman bin Abdul Karim, *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in*, Jember: Diva Press, 2014.

Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, terj. Chep. M. Faqih FR, Jakarta: Beirut, 2014.

Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Pembaharu dari Bani Umayyah*, terj. Shoufau Qolbi Jakarta:Pustaka Al-kausar,2010.

Al-Quran dan Terjemahnya.Semarang: CV.Alwaah, 1989.

Armando, *Umar Ibn Abdul Aziz* dalam Ensiklopedi Islam, Vol.3, ed. Sri mulyati, et al, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 2005.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: kencana prenada media group, 2007.

Desi Anwar, *kamus lengkap 1 Milliard Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*,Surabaya: Amelia, 2003.

Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dwi Martini, *Good governance dalam Pelayanan Publik, (Konsep, Strategi dan Implementasi Good governance dalam Pemerintahan)*, Jakarta: IRJEN DEPAG RI, 2007

Fahsin M. Fa'al, *Sejarah Kekuasaan islam*, Jakarta Barat: CV. Artha Rivera, 2008.

Imam As-Syuyuthi, *Tarikh Khulafa, Terj. Samson Rahman* , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Inu Kencana Syafiie, *Ilmu pemerintahan, Cet.1*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

Iskandar Hasan, *Peran dan Fungsi Pengawasan dalam Perwujudan Good Governance*, Jakarta: Irjen Depag RI, 2007.

Isra Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Komaruddin Hidayat, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Cet III. ICCE, 2007.

Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.

Muhammad Mojlum, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, terj. Wiyanto Suud dan Khairul Imam, Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012.

- Muhammad Siddiq Al-Minsyawi, *100 Tokoh Zahud*, terj. Abdullah, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007.
- Nurdin Ali, *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Ideal dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2016.
- Radis basdian, *Sistem-sistem Pemerintahan sedunia: Ragam bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara-negara di dunia*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja rafindo Persada, 2006.
- Samsul munir amin, *sejarah peradaban islam*, Ed. 1, cet. 2, Jakarta:Amzah, 2010.
- Sirajuddin, Sukriano Didik dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*.Jakarta: Setara Press, 2012.
- Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi*, (Mixed methods), Cet.V, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, jakarta: rineka cipta, 2002.
- Sunaryo, *Implementasi Good governance dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Irjen Depag RI, 2007.

Suyuti Pulungan, *Umar Ibn Abdul Aziz* dalam Ensiklopedi Islam, Vol 4, Ed. Harun Nasution Et Al, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

W.j.s.poewadarminta, 2007. *kamus umum bahasa indonesia*. Edisi tiga. Balai pustaka.pusat bahasa departemen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nana Audina
2. Tempat/Tgl.Lahir : Mns. Krueng/ 13-november-1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. NIM : 140403002
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia (WNI)
7. Alamat : Mns. Krueng
 - a. Kecamatan : Kembang Tanjung
 - b. Kabupaten : Pidie
 - c. Provinsi : Aceh
8. Telp/HP : 085360017831
9. E_Mail : nana.audina95@gmail.com



B. Riwayat pendidikan

10. SD/MI : MIN 1 Kembang Tanjung (2002 s.d. 2008)
11. SMP/MTs : MTsS Jeumala Amal (2008 s.d. 2011)
12. SMA/MA : MAS Jeumala Amal (2011 s.d. 2014)
13. Peguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry (2014 s.d. Sekarang)

C. Data Orangtua

14. Nama Ayah : Abdul Muthalib
15. Nama Ibu : Safwati
16. Pekerjaan
 - a. Ayah : Tukang Jahit
 - b. Ibu : IRT
17. Alamat : Mns. krueng, Kec. Kembang Tanjung, Kab. Pidie

Banda Aceh,2018

Peneliti,

Nana Audina
NIM.140403002

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-561/Un.08/FDK/Kp.00.4/01/2018

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

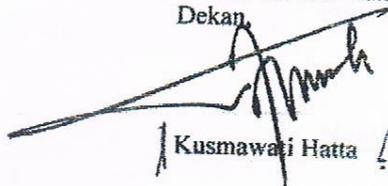
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Meningat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Menunjuk : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Fakhri, S. Sos, MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Raihan, S.Sos.I, MA. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Nana Audina.
NIM/Jurusan : 140403002/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Sistem Pemerintahan Good Governance Umar Bin Abdul Aziz
- Dua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Tiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Empat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Tetapan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 31 Januari 2018 M.
14 Jumadil Awwal 1439 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan



Kusmawati Hatta

Keputusan:
Rektor UIN Ar-Raniry.
Bag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
Pembimbing Skripsi.
Mahasiswa yang bersangkutan.
Korisp.

Keputusan:
Berlaku sampai dengan tanggal: 31 Januari 2019 M..

Dokumentasi saat sidang Munaqasyah

